

BAB 4

KESIMPULAN

Perkembangan wanita Jepang yang signifikan dimulai pada saat Amerika dan bangsa Barat lainnya memasuki Jepang, dan peranan wanita Jepang semakin berkembang setelah dibuatnya undang-undang *Minpo* yang melindungi martabat individu dan gender. Terjadinya kekalahan Jepang pada Perang Dunia II mengakibatkan goyahnya stabilitas segala aspek internal Jepang, pada saat itu para wanita mulai bekerja dan semakin lama berhasil memperbaiki perekonomian Jepang.

Setelah perang selesai, para pria kembali dari medan perang kepada pasangan mereka, sejak itu jumlah kelahiran meningkat pesat. Hal ini mengakibatkan ledakan angka kelahiran pertama mulai dari tahun 1947 sampai 1949, namun karena pada saat itu kondisi ekonomi Jepang yang terkena krisis akibat perang, membuat pemerintah Jepang mengesahkan *Yuusei Hogo Hou (Eugenic Protection Law)* yang melegalkan aborsi pada tahun 1948 karena masyarakat belum terbiasa dengan alat kontrasepsi. Setelah diberlakukannya kebijakan tersebut, Jepang pun berhasil mengurangi jumlah penduduknya hingga tahun 1971-1974, kemudian terus kembali menurun setiap tahunnya.

Peranan wanita Jepang kontemporer sangat berpengaruh pada fenomena *Shoushika*. di antaranya adalah pentingnya karir dalam kehidupan wanita Jepang, semakin majunya kehidupan wanita Jepang dan banyaknya wanita yang menunda pernikahan. Menurunnya jumlah rata-rata kelahiran yang menyebabkan semakin berkurangnya jumlah populasi anak-anak dan peningkatan jumlah populasi usia menua di Jepang, terjadi lebih cepat daripada negara-negara lain.

Shoushika telah memberi banyak pengaruh dalam berbagai sektor di Jepang, yaitu dalam sektor ekonomi, masalah pembayaran uang pensiun, kurangnya ketersediaan sumber daya manusia, pengaruh dalam bidang sosial, serta dalam bidang pendidikan. Dikarenakan oleh banyaknya pengaruh yang

negatif dari fenomena *shoushika* ini, pemerintah Jepang pun telah menjalani berbagai upaya untuk mengurangi dampak dari fenomena ini, antara lain adalah kebijakan *Angel Plan*, kebijakan ini merupakan kebijakan untuk memperbaiki jumlah dan kualitas pusat-pusat penitipan dan perawatan anak, kebijakan *Child Care Leave* yaitu kebijakan cuti merawat anak, baik bagi sang ibu maupun cuti bagi sang ayah, kebijakan *Paternal Leave* (cuti merawat anak bagi sang ayah) dan *Maternal Leave* (cuti merawat anak bagi sang ibu), dan kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat membantu para pekerja wanita di Jepang untuk tetap menikah dan memiliki anak tanpa mengorbankan pekerjaan mereka dan memperbaiki masalah *shoushika* di Jepang.



